

TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KUALA KURUN - DINAS KESEHATAN  
2025

PERBUP NO.45, BD 2025/NO.793, 33 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS

**ABSTRAK:**

- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks yang memberikan layanan secara profesional dan paripurna kepada masyarakat melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, untuk mendukung pelayanan kesehatan Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.5 tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 17 Tahun 2023, UU No.20 Tahun 2023, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 47 Tahun 2021, PERPRES No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 76 Tahun 2021, PERPRES No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 76 Tahun 2021, PERPRES No. 77 Tahun 2015, PEMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PEMENDAGRI No. 120 Tahun 2018, PEMENDAGRI No. 79 Tahun 2018, PERMENKES 3 Tahun 2020, PEMENDAGRI No. 12 Tahun 2017, PERDA KAB. GUMAS No. 7 No. 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023, PERDA No. 1 Tahun 2020, PERBUP KAB. GUNUNG MAS No. 47 Tahun 2023
- Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang selanjutnya disingkat Komite PMKP adalah komite terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien di rumah sakit seperti pengukuran indikator mutu, analisis data, serta upaya perbaikan proses pelayanan untuk meminimalkan risiko dan kesalahan

**Catatan**

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- 35 hlm.

